

KETERLIBATAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DESA POLEWALI KECAMATAN SINJAI SELATAN

Hasdinawati¹, Syamsuddin² & Salman³

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: hasdinawati02@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: syam.sinjaiku@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: salmanimm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa Polewali, Sekertaris Desa Polewali, Staff Pemerintah Desa Polewali, Ketua BPD Desa Polewali dan Masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya maksimal baik dalam akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan maupun beban biaya pendidikan. Keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung kualitas pendidikan di Desa Polewali dalam akses pendidikan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang putus sekolah diakibatkan oleh akses jalan dengan kondisi rusak ditambah jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga lumayan jauh. Adapun penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan penyelenggaraan PAUD, TK/TPA Madrasah non formal dan pembangunan WC SDN 244 Jenna, talud SDN 244 Jenna dan TBM menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara sarana dan prasarana telah terlaksana. Demikian halnya dengan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di desa polewali dalam membantu beban biaya pendidikan sudah terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan membantu beban biaya pendidikan masyarakat hal ini dibuktikan dengan beberapa bantuan yang telah di berikan kepada masyarakat. Salah satu bantuannya yaitu berupa pembagian ikan air tawar (ikan nila) secara gratis untuk dibudidayakan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban biaya pendidikan.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan; Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah desa perlu keterlibatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) yaitu “ kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Salah satu tugas kepala desa yang berkaitan dengan pendidikan yaitu melaksanakan

pembangunan desa dalam artian pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah adalah di Kabupaten Sinjai khususnya di Desa Polewali kecamatan 46erawa selatan, yang tersebar 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa. Penyebab utama masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, faktor ini diakibatkan oleh pemerintah desa yang belum bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa polewali baik dari segi pertanian maupun peternakan bahkan dari segi pendidikan. Penduduk miskin yang ada di desa yang tersebar di lima dusun yang ada di Desa Polewali, yang mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang di dapat tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran, banyak pengangguran, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di desa polewali dengan angka persentase penduduk miskin yang cukup tinggi diatas 70% dengan jumlah penduduk mencapai angka 2020 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 517 KK di tahun 2021.

Faktor budaya yaitu masih rendahnya dukungan orang tua dan persepsi keliru sebagian warga Desa Polewali masih mementingkan soal jodoh anaknya dibanding menempuh pendidikan yang tinggi bahkan dukungan dari pemerintah desa untuk melanjutkan pendidikan sangat rendah sehingga faktor budaya soal perjodohan masih kental dikalangan masyarakat khususnya di Desa Polewali. Berdasarkan data dari pemerintah desa pada tahun 2021 angka anak putus sekolah akibat menikah muda mencapai 20% yang ada di Desa Polewali.

Faktor lokasi, factor ini juga menyebabkan pendidikan masih tergolong rendah di Desa Polewali karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum merata khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Polewali ditambah lokasi dari sekolah SMP dan SMA/SMK sederajat masih sangat jauh dan jarak tempuh dari rumah warga ke sekolah sekitar ± 2 kilometer untuk jenjang SMP dan untuk jenjang SMA/SMK sederajat ± 7 kilometer dan sebagian pelajar menempuh perjalanan hanya dengan berjalan kaki. Berdasarkan permasalahan tersebut atas nama penulis melakukan pengajuan dengan judul Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset yang yang digunakan untuk memperjelas gejala social melalui berbagai variable penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Polewali yang melibatkan langsung pemerintah desa dan masyarakat. Jenis data yaitu data sekunder dan data primer.

PEMBAHASAN

Keterlibatan merupakan tindakan yang di jalankan oleh Kepala Desa Polewali dalam melaksanakan kebijakan demi tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan. Keterlibatan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Keterlibatan pemerintah desa dalam dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di dapat dilihat melalui visi dan misi kepala desa. Adapun visi dan misi tersebut yang terkait dan menjadi tugas dari Pemerintah Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali adalah yang ke 6 dan 8, yaitu: Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa desa pintar dan Mendorong pembangunan fasilitas asrama mahasiswa polewali dan rumah singgah.

1. Aspek Pendidikan

Faktor terpenting dalam keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung kualitas pendidikan adalah akses pendidikan. Dimana akses pendidikan merupakan kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatan dalam menempuh suatu program pendidikan. Adapun akses pendidikan yang dimaksud adalah mempermudah akses jalan untuk kesekolah dan memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu.

Infrastruktur merupakan sarana vital dalam pembangunan suatu desa. Infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan, sangat dibutuhkan untuk menopang kemajuan ekonomi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan bidang-bidang lainnya di desa. Demikian pula dengan pemerintah Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai perlu terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat desa, dimana jalan tersebut juga mempermudah akses pendidikan dikarenakan jalan yang dibangun merupakan akses jalan menuju sekolah SD, SMP, dan SMA.

Tabel 1. Status Jalan

No	Status Jalan	Jumlah	tahun
1.	Jalan Desa	9,7 Km	2017
2.	Jalan kabupaten	52 Km	2017

Sumber: Kantor Desa Polewali, Tahun 2022

Pada tabel 1. diatas peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil observasi bahwa akses jalan di Desa Polewali setelah dimekarkan pada Tahun 1989 sampai Tahun 2017 masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa untuk status akses jalan di Desa Polewali dan pada tahun 2017 berdasarkan data dokumentasi bahwa status akses jalan di Desa Polewali telah menjadi bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan jumlah jarak 52 Km sedangkan untuk status akses jalan desa dengan kewenangan pemerintah Desa Polewali jaraknya hanya berjumlah 9,7 Km pada tahun 2017 sampai sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali sudah terlaksana secara akses pendidikan tetapi belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa pembangunan akses jalan desa seperti pembangunan rabat beton dan jembatan di Desa Polewali dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menempuh pendidikan, meskipun pemerintah Desa Polewali telah melakukan pembangunan hal tersebut belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa polewali hal tersebut dibuktikan berdasarkan observasi langsung di lapangan bahwa akses jalan yang ada di Desa Polewali sudah dalam keadaan rusak setelah pembangunan dilaksanakan hal tersebut juga dibuktikan pada saat melakukan wawancara. Selain mempermudah akses jalan kesekolah akses pendidikan juga termasuk dalam memberikan bantuan untuk siswa kurang mampu, hal tersebut sudah terlaksana tetapi belum maksimal dikarenakan siswa kurang minat untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren, hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa pada Tahun 2016 hanya 1 orang yang terdaftar masuk pondok pesantren.

2. Aspek Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan ketersediaan atau kesiapan fasilitas seperti bangunan sekolah, kelas, pengadaan perpustakaan, penyediaan bahan belajar dan tempat belajar pendidikan diluar sekolah seperti taman baca masyarakat (TBM). Tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan yang dibuat mungkin hanya menjadi argumen tanpa adanya realisasi yang maksimal karena sumber-sumber yang mendukung kualitas pendidikan yang efektif adalah meliputi sarana dan prasarana pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan adalah faktor utama yang mendukung kualitas pendidikan. Adapun salasatu bentuk serta tujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat adalah sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di desa polewali dapat dilihat pada penyelegaraan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 2. Daftar Penyelenggaraan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Polewali

Penyelenggaraan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah	Tahun
Paud	4.800.000.00	4.800.000.00	2016
Tk/Tpa	4.800.000.00	4.800.000.00	2016
WC SDN 244 Jenna	2.000.000.00	2.000.000.00	2021
Talud SDN 244 jenna (beton)	128.238.000.00	128.238.000.00	2020
Bangunan Taman Baca	2.000.000.00	2.000.000.00	2020

Masyarakat			
------------	--	--	--

Sumber: Kantor Desa, tahun 2022

Pada tabel 2. diatas peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil data dokumentasi bahwa keterlibatan Pemerintah Desa dalam mendukung kualitas pendidikan di Desa Polewali secara sarana dan prasarana telah terlaksana dapat dibuktikan melalui penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan penyelenggaraan paud sebesar 4.800.000.00 pada tahun 2016, TK/TPA 4.800.000.00 pada tahun 2016, Madrasah non formal 4.800.000.00 pada tahun 2016 dan pembangunan WC SDN 244 Jenna sebesar 2.000.000.00 pada tahun 2021 dan talud SDN 244 jenna sebesar 2.000.000.00 pada tahun 2020 dan Taman Baca Masyarakat sebesar 2.000.000.00 pada tahun 2020, Bantuan tersebut merupakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan bahwa Pemerintah Desa Polewali telah menyalurkan bantuan untuk sarana prasarana pendidikan untuk tingkat PAUD dan SD dan menyediakan tempat belajar untuk masyarakat diluar sekolah berupa bangunan Taman Baca Masyarakat (TBM). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah ikut terlibat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di desa polewali secara penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, hal ini dibuktikan dengan beberapa sarana dan prasarana yang telah di selenggarakan dan dibangun dengan menggunakan anggaran dana desa, Dimana sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar baik di sekolah maupun belajar di luar sekolah.

3. Beban Biaya Pendidikan

Faktor terpenting dalam menempuh pendidikan dimana beban biaya pendidikan merupakan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa dalam menempuh pendidikan seperti biaya transportasi, biaya SPP dan beban biaya lainnya. Hal ini dapat menghambat pendidikan masyarakat dan itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakat yang putus sekolah, berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah desa perlu terlibat dalam mengatasi masalah yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa bantuan pemerintah desa terhadap beban biaya pendidikan untuk masyarakat khususnya orang tua siswa salah satunya berupa bantuan bibit ikan nila.

Tabel 3. Nama-Nama Penerima Bibit Ikan Nila Desa Polewali pada Tahun 2021

No	Nama	Jumlah Ikan	Alamat	Tahun
1.	Lallo	1.700	Dusun Bontopaddu	2021
2.	Adil	500	Dusun Bontopaddu	2021
3.	Herlan	1.000	Dusun Bontopaddu	2021
4.	Irfan	1.500	Dusun Bontomanai	2021
5.	Tahere	1.600	Dusun Bontomanai	2021

6.	Ilyas	500	Dusun Bontomanai	2021
7.	Andi Baso	1.000	Dusun Bontomanai	2021
8.	Ansar	500	Dusun Bontomanai	2021
9.	Tohe	1.000	Dusun Bontomanai	2021
10.	Herdianto	200	Dusun Bontomanai	2021
11.	Dahlan	1.000	Dusun Bontomanai	2021
12.	Anwar	200	Dusun Bontomanai	2021
13.	Salama	1.500	Dusun Jenna	2021
14.	Tasrim	500	Dusun Jenna	2021
15.	Akmal	800	Dusun Lengcese	2021
16.	Noni	200	Dusun Mattirolau	2021
17.	Hijrah	300	Dusun Mattirolau	2021
18.	Jake	300	Dusun Mattirolau	2021
19.	Ajji	300	Dusun Mattirolau	2021
20.	Suardi	300	Dusun Mattirolau	2021
21.	Soi	300	Dusun Mattirolau	2021

Sumber : Kantor Desa, tahun 2022

Pada tabel 4.7 diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan penduduk masyarakat dalam rangka membantu beban biaya pendidikan di Desa Polewali sangat didukung oleh pemerintah desa, bisa dilihat dari salah satu program yang dikeluarkan pemerintah Desa Polewali pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah sebesar 3.475.000.00, programnya yaitu pembudidayaan ikan air tawar yang diberikan bibit langsung kepada masyarakat dengan jumlah 13.900 ekor dan diprioritaskan untuk orang tua yang anaknya masih melanjutkan pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA) dengan pemberian bantuan secara berbeda kepada orang tua siswa sesuai dengan tingkat pendidikan anaknya dengan tujuan agar orang tua tetap melanjutkan pendidikan anaknya demi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan observasi langsung lapangan bahwa bantuan tersebut telah sampai ketangan masyarakat, dengan hasil dari bantuan bibit ikan nila tersebut orang tua siswa sangat terbantu karena dapat membelikan seragam sekolah dan menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan untuk biaya sekolah seperti uang saku sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti, penulis berkesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sudah terlaksana tetapi belum maksimal, baik dalam akses pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun beban biaya pendidikan. hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang putus sekolah diakibatkan oleh akses jalan dengan kondisi rusak ditambah jarak tempuh dari rumah ke sekolah juga lumayan jauh. Adapun penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan penyelenggaraan paud sebesar 4.800.000.00,

TK/TPA 4.800.000.00, Madrasah non formal 4.800.000.00 dan pembangunan WC SDN 244 Jenna sebesar 2.000.000.00, talud SDN 244 jenna sebesar 2.000.000.00, dan TBM sebesar 2.000.000.00 ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Polewali secara sarana dan prasarana telah terlaksana.

Demikian halnya dengan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Polewali dalam membantu beban biaya pendidikan sudah terlaksana hal ini dibuktikan dengan membantu beban biaya pendidikan masyarakat hal ini dibuktikan dengan beberapa bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat salahsatu bantuannya yaitu berupa pembagian ikan air tawar (ikan nila) secara gratis untuk dibudidayakan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban biaya pendidikan.

REFERENSI

- Bahrn, Syam Andi, R. (2012). Evektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Desa Batulappa Kecamatan Pattimpeng. (Study Kasus Desa Pattimpeng). Jurnal Ilmu Administrasi, 8(2).95-110. <https://doi.09/10.47030/administrasita.V8i2.162>.
- Elfindri. (2008). Pembangunan Desa di Bidang Pendidikan.Jurnal Pekbis, vol. 2, No.1. <http://repo.unand.ac.id>.
- Elmi Arsita, Syafruddin, Muhammad Ilyas. (2022) Anak putus sekolah. (studi kasus di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Vol 9(1). No 43-48. <https://doi.org/10.29303/jidiksiam.v9i1.182>.
- Hakim Lukman. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial. Vol 2. No 1). <https://dx.doi.org/10.30596%fedutech.v2i1.575>.
- Jannah, Miftahul Akmal dan Rustansantaria.(2020). Mutu Pendidikan Era Revolusi 4.0 di Tengah Covid-19.Jurnal of teaching dan learning research 2(2) 1-12,2020. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id>.
- Jumati. (2016). Pelayanan pendidikan dasar di desa berinang mayun kecamatan menyuke kabupaten landak. (studi kasus di desa barinang mayun kecamatan menyuke kabupaten landak). Jurnal ilmu administrasi Negara. Vol 5. No 2. <https://fisipuntan.org.ac.id>.
- Lutfi, Muhammad,et al.2020.Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Sinjai: UMSI Press.
- Lilis Dwiranti. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. (Studi Kasus di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai).Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 6(2). No 87. <https://Digilbadmin.Unismuh.Ac.Id>.
- Maleong, Lexy J. (2012). Meteodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Dskarya.
- Mustafa, Sasmito Cahyo. (2017). Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa.jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Vol 6, No.3. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1462>.
- Nur Fatmawati, Andi Mappincara, Sitti Habibah. (2019). Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. (studi kasus SMP Negeri 7 Makassar). Jurnal Ilmu Pendidikan Keguruan dan Pembelajaran. Vol 3(2). No 115-121. <https://ojs.unm.ac.id>.
- Pawestri, Aprilina, dkk.(2017). Penguatan Peran Pemerintah Desa Untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun Sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Study Pada Kabupaten Bangkala).Jurnal pamator: jurnal ilmiah universitas trunojoyo 10(2), 112-121,2017. <https://doi.org/10.21107/pamator.V10i2.4145>.
- Rahmatullah & Endy (2017). Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pendidikan Formal di Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. (Study Kasus Desa Ulak

- Kembahang 2 Kecamatan Pemulatan Barat Kabupaten Ogan Ilir).Jurnal association profession of pancasila and sivic education. <https://doi.org/10.36706/jbti.vi2.4544>.
- Rosa,Mirna Wirta, et al. (2021). Pemanfaatan Dana Desa dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. (Studi Kasus Gampong Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie). Jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha, 9(2), 537-544, 2021. <https://unduksha.ac.id>.
- Setya, Denny Budi. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pendidikan Non Formal Dan Pengembangan Desa Sesuai Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Desa Cibunian Pamijahan, Bogor, Jawa Barat). Jurnal non formal, 2(8), 2018. <https://dspace.uui.ac.id>.
- Sutisna, et al.(2018).Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan,Ekonomi dan Kesehatan. (Studi Kasus Desa Situ Ilir). Jurnal pengabdian masyarakat 3(1), 2019. <https://doi.org/10.32832/abdidos.V3il.289>.
- Surya S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. Jurnal pendidikan dan pembangunan. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v1.4i1.971>.
- Suri Margi Rahayu, Utama. (2016). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama. Jurnal Varidika. Vol 2. No 123-129. <https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724>.
- Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us. (2021). Pembiayaan pendidikan. Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial. Vol 2(1). No 266-280.<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.
- Wati, Mustika.et al. (2018). Sustainable Development Golas (SDGs) dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.(Program Study Pendidikan Fisika, FTKIP, Universitas Lambung Mangkurat). Prosiding seminar nasional pendidikan fisika.Universitas lambung mangkurat. 2018.
- Widjaja.(2002). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta: Pt. Raja Gafindo Persada.
- Winarno, Taufiq. (2013). Strategi Pemberdayaan Sekolah Melalui Program Sekolah Desa Produktif.(Study Kasus Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor). Jurnal kesejahteraan sosial.<https://journal.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12356789/45909>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undan-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Jalan Dan Peraturan Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Dapat Diserahkan Kepada Desa dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).